

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan pilih leha-leha

Pembahasan APBD 2020

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta memilih santai dalam membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020. Walaupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak perpanjangan waktu pembahasan yang diajukan wakil rakyat di Kebon Sirih itu.

"Hingga saat ini belum ada jadwal rapat anggaran untuk menindaklanjuti hasil rapat KUA-PPAS untuk APBD 2020," ungkap Zita Anjani, wakil ketua DPRD DKI Jakarta kepada INDOPOS di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kini anggota masing-masing komisi masih merampungkan hasil rapat bersama eksekutif tersebut. "Belum ada jadwal karena di masing-masing komisi masih dirampungkan. Sudah selesai cuma mereka harus direkap di internal dulu hasilnya itu apa. Tapi kalau untuk pembahasannya sudah selesai tinggal hasil dari tiap komisi," kata Zita.

Zita menyebutkan, tidak ada target pelaksanaan rapat Badan Anggaran (Banggar) karena pimpinan DPRD DKI Jakarta tidak ingin pembahasan berlangsung terburu-buru. "Kami juga enggak bisa memaksa kalau komisi-komisi belum selesai. Soalnya mereka lebih tau apa yang ada di komisinya. Jangan nanti kami cepat tapi nanti justru hasilnya enggak efektif," imbuh dia.

Dengan pembahasan yang berlangsung cukup lama, putri Wakil Ketua MPR RI itu justru menilai legislatif sedang bekerja keras dan secara detail. "Justru kami slowly, menurut saya ini bagus ya, budaya yang positif di DPRD semuanya. Masing-masing komisi bekerja keras secara detail untuk membahas satu per satu," ujar dia.

Zita mengaku, sudah berkiriman surat ke Kemendagri, beberapa hari lalu. Dalam surat itu, meminta penambahan waktu tanpa menyebut batas waktu. "Kita enggak minta sih kapannya kita hanya minta tambah saja. Kita tidak bilang oh mesti sekian. Enggak. Kita hanya minta kelowongan lah waktu tambah," tutur dia.

Kendati surat telah dikirim, Zita menegaskan, tidak ngoyo berharap permintaan tambahan waktu diterima Kemendagri dan tak masalah juga permintaan itu ditolak.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C (bidang

keuangan) DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY menambahkan, ada sejumlah catatan penting yang menjadi evaluasi bagi rancangan KUA-PPAS tersebut.

Catatan itu antara lain, perlunya keseriusan seluruh pihak dalam menghadapi defisit anggaran karena belum terealisasinya dana bagi hasil sebesar Rp6,3 triliun untuk DKI Jakarta dari pemerintah pusat. Hingga akhirnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengurangi proyeksi APBD tahun anggaran 2020 dari Rp95,99 triliun menjadi Rp89,44 triliun.

"Ketua TAPD bilang kalau dana bagi hasil (Rp6,3 triliun-red) itu akan masuk di kuartal kedua atau ketiga tahun depan, makanya saya pikir ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya defisit," ucap dia, di lokasi yang sama.

Karena itu, ia mendorong seluruh BUMD mampu mengoptimalkan kinerja untuk mendapat keuntungan positif dari penyertaan modal daerah (PMD) yang telah diberikan pemerintah. Dengan begitu pembagian laba dalam bentuk dividen vane diberikan BUMD kepada pemerintah diharapkan terus meningkat.

"Saya kira Penyertaan Modal Daerah itu perlu untuk mengembangkan usaha BUMD. Rasio kecukupan modal itu penting agar BUMD kita punya daya saing tinggi. Kalau sudah dapat tambahan modal menurut hemat saya ya dividen yang diberikan harus bisa ditingkatkan," terang Rasyidi.

Komisi C, lanjut dia, akan terus mengkoreksi seluruh rancangan satuan tiga mata anggaran hingga alokasi postur Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang diusulkan seluruh SKPD maupun Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diusulkan sejumlah BUMD melalui APBD 2020.

Koreksi tersebut akan berlanjut hingga tingkat Badan Anggaran (Banggar) yang rencananya akan dimulai pekan ini. "Kalau kami menemukan kegiatan atau anggaran yang dianggap tidak rasional ya tentu akan kita coret. Kalau kegiatan itu memang prioritas tentu kita dukung, tapi kalau tidak akan dikoreksi. Ini juga bagian dari efisiensi," tutup dia. (aen)

CATATAN DPRD DKI JAKARTA

- ✓ Perlu keseriusan menghadapi defisit anggaran
- ✓ Sehingga belum terealisasinya dana bagi hasil sebesar Rp6,3 triliun untuk DKI Jakarta dari pemerintah pusat
- ✓ Akibatnya, TAPD mengurangi proyeksi APBD 2020 dari Rp95,99 triliun menjadi Rp89,44 triliun